

# ANALISIS *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN KABUPATEN KAPUAS HULU

## *Analysis of Stakeholders in Betung Kerihun National Park's Ecosystem Development, Kapuas Hulu District*

Muji Listyo Widodo<sup>a</sup>, Rinekso Soekmadi<sup>b</sup>, Hadi Susilo Arifin<sup>c</sup>

<sup>a</sup>*Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680 – emel\_widodo@yahoo.co.id*

<sup>b</sup>*Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680*

<sup>c</sup>*Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor 16680*

**Abstract.** *Betung Kerihun National Park (BKNP) is a transboundary conservation area. BKNP region has various attractive ecotourism activities are covered in the context of the nature, culture and 55adventure. But the number of foreign tourists who have visited is still low. BKNP has not been a major tourist destination yet, because the stakeholders have not synergistic in the management of ecotourism in BKNP. The study of stakeholders in accordance with its role and function is urgently needed. This research aims to identify the stakeholders and determine the relationship between stakeholders who are involved in the ecotourism development at BKNP. The data were analyzed using stakeholders analysis methods. There were 23 stakeholders identified involved in the ecotourism development in BKNP. The stakeholder mapping resulted in four as subject (high interest but low influence), six stakeholders as key player (high influence and high importance), eight stakeholders as setter context (high influence but low interest), and five stakeholders as crowd (low influence and low interests). There were three relationships between each stakeholder that were identified, which are communication, cooperation, and coordination.*

Keywords: *ecotourism, conservation, stakeholders, national park*

(Diterima: 24-10-2017; Disetujui: 13-02-2018)

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) merupakan kawasan konservasi terbesar di Propinsi Kalimantan Barat dengan luas 816.693,40 ha. Kawasan TNBK memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata alam (*nature tourism*), wisata budaya (*culture tourism*), maupun wisata petualangan yang menantang (*adventure tourism*). Pengelolaan TNBK secara langsung ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) yang berada dalam koordinasi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan TNBK sebagai sumber daya potensial yang dapat dieksploitasi dan dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu pengelolaan TNBK harus selaras dengan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu.

Salah satu upaya pengelolaan yang dilakukan oleh BBTNBKDS adalah pengembangan wisata alam. Sektor pariwisata terutama wisata alam merupakan salah satu penyumbang devisa negara di bidang non migas yang mendapat perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan dengan adanya perubahan paradigma

dalam pembangunan kehutanan dari *timber management* ke arah *multi purpose and multi function management*. Hutan tidak hanya dieksploitasi untuk menghasilkan kayu, tetapi mempunyai fungsi lebih luas yaitu sebagai jasa lingkungan dan pariwisata alam. Pengembangan wisata alam dalam bentuk ekowisata di kawasan TNBK diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, yaitu terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.

Program pengembangan ekowisata di TNBK membutuhkan kerja sama dari insan-insan pariwisata. Dibutuhkan peran aktif *stakeholders* secara nyata di lapangan. Diperlukan usaha untuk mengoptimalkan dan mensinergiskan semua *stakeholders* yang berkepentingan terhadap kawasan TNBK. Dengan bersinergisnya *stakeholders* yang terlibat sesuai peran dan fungsinya masing-masing, maka akan terjalin hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerja yang baik antar *stakeholders* tersebut akan mendukung keberhasilan dalam menjalankan program-program pengembangan ekowisata di TNBK.

Pengembangan wisata alam dalam bentuk ekowisata di kawasan TNBK diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat, yaitu terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Beaumont (2011); Pegas *et al.* (2013); Shoo dan Songorwa (2013), bahwa ekowisata dapat membawa dampak positif berupa

peningkatan ekonomi, konservasi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Saat ini pengelolaan ekowisata di TNBK masih sederhana dengan sarana, prasarana dan jumlah personil yang masih terbatas. Kunjungan wisatawan masih rendah. Kegiatan wisata belum berdampak nyata bagi masyarakat lokal maupun pemerintah daerah. Pengelolaan ekowisata di TNBK tidak cukup hanya memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik wisata yang ada. Pengelolaan ekowisata di TNBK merupakan suatu usaha yang sangat kompleks. Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Setiap *stakeholders* mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan pengembangan kawasan ekowisata di TNBK. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian tentang *stakeholders* dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya.

### 1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi *stakeholders*, untuk mengklasifikasikan *stakeholders* dan untuk menggambarkan hubungan antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi kegiatan penelitian dilakukan di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), *stakeholders* yang berada di Putussibau, Pontianak dan Desa Sadap Kecamatan Embaloh Hulu. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pertengahan Januari 2016 hingga pertengahan April 2016.

### 2.2. Pengumpulan Data dan Tahapan Analisis

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan langsung di lapangan, wawancara mendalam dan studi pustaka (Idrus, 2009). Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis *stakeholders* (Reed *et al.*, 2009), tahapannya yaitu meliputi identifikasi *stakeholders*, klasifikasi *stakeholders* dan hubungan antar *stakeholders*.

### 2.3. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK. Identifikasi *stakeholders* dan kepentingannya dilakukan dengan pengamatan lapang dan wawancara dengan metode *purposive sampling* dan *snow-ball sampling*. *Stakeholders* dipilih dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari

*stakeholders* sebelumnya, peneliti dapat menetapkan *stakeholders* lainnya yang dipertimbangkan dapat memberikan data lebih lengkap. *Stakeholders* terdiri dari unsur *Academy*, *Businesses*, *Government* dan *Community* (Dwyer dan Edwards 2000).

### 2.4. Klasifikasi Stakeholders

Klasifikasi *stakeholders* dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap pengembangan ekowisata di TNBK. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria pengaruh dan kepentingan. Penetapan skoring menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan. Pengukuran data berjenjang lima adalah modifikasi model yang dikembangkan oleh Siregar (2011); Roslinda *et al.* (2012). Nilai skor dari lima pertanyaan dijumlahkan kemudian hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders* dikelompokkan menurut jenis indikatornya lalu disandingkan sehingga membentuk koordinat. Posisi koordinat dapat menggambarkan ilustrasi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing *stakeholders*. Hasil klasifikasi *stakeholders* berdasar pengaruh dan kepentingannya terbagi ke dalam 4 golongan yaitu *Key Player*, *Subject*, *Context Setter* dan *Crowd* (Bryson, 2004); (Reed *et al.*, 2009).

### 2.5. Hubungan Antar Stakeholders

Hubungan antar *stakeholders* dipetakan berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan informan kunci. Pemetaan terhadap hubungan antar *stakeholders* merupakan gambaran dari hubungan antar *stakeholders* baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan dengan metode deskripsi. Hubungan antar *stakeholders* dikelompokkan menjadi hubungan kerja sama, komunikasi dan koordinasi yang memenuhi 5 komponen kriteria dan indikator ekowisata yaitu konservasi, partisipasi, edukasi rekreasi, ekonomi dan kendali (Sekartjajarini, 2009).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Identifikasi Stakeholders

Hasil identifikasi *stakeholders* menunjukkan bahwa *stakeholders* berasal dari unsur instansi pemerintahan (*government*), masyarakat (*community*), perguruan tinggi (*academy*) dan swasta (*business*). Jumlah *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK ada 23 buah (Tabel 1).

*Stakeholders* dari unsur pemerintah yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekowisata di TNBK memiliki peran yang tidak

sama satu sama lain. *Stakeholders* dari unsur pemerintah pusat yakni Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS). BBTNBKDS menjadi *stakeholders* penting karena berwenang sebagai pengelola TNBK. Bentuk peran-peran tersebut meliputi perlindungan sumberdaya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan pelayanan ekowisata, penyediaan data dan informasi ekowisata. *Stakeholders* dari unsur pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat propinsi maupun kabupaten sebagai instansi teknis terkait, memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat setempat dan penyedia data informasi ekowisata di kawasan TNBK.

Tabel 1. Hasil Identifikasi *Stakeholders*

No	Klasifikasi	Instansi/Stakeholders
1	Pemerintah Pusat (Central Government)	Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
2	Pemerintah Daerah (Local Government)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perhubungan Pos Lintas Batas Badau Provinsi Kalbar; Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Pengelola Perbatasan; Dinas Bina Marga dan Pengairan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi; Dinas Perkebunan dan Kehutanan; Kantor Imigrasi; Kantor Lingkungan Hidup
3	Masyarakat (Community)	Kompakh; WWF; Langgong Jerangau; Kepala Dusun Sadap; Tokoh Masyarakat
4	Perguruan Tinggi (Academy)	Universitas Tanjungpura
5	Swasta (Business)	Pengusaha Hotel; Pengusaha <i>Tour</i> dan <i>Travel</i> ; Pengusaha Transportasi

*Stakeholders* dari unsur masyarakat terdiri dalam kelompok masyarakat dan perorangan yang berada di Dusun Sadap. Dusun Sadap merupakan sebuah perkampungan kecil yang dihuni oleh etnik Dayak Iban dan merupakan pemukiman terdekat dengan kawasan TNBK. Masyarakat Sadap masih hidup dalam suatu komunitas rumah betang yang terdiri dari 24 pintu. Kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar yang sangat bergantung terhadap alam dan kekayaan budayanya yang beragam merupakan salah satu daya tarik yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata. Dusun Sadap telah ditetapkan sebagai desa wisata pada tanggal 30 Oktober 2011. *Stakeholders* dari unsur masyarakat ini memiliki peran sebagai penyedia pelayanan wisata, baik sebagai pemandu wisata, koki, *porter*, dll. Beberapa anggota masyarakat telah menyiapkan biliknya untuk dijadikan sebagai *Homestay* bagi tamu yang ingin menginap di Dusun Sadap.

*Stakeholders* dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Kompakh dan *World Wildlife Fund* (WWF). WWF merupakan lembaga non profit di bidang konservasi yang bekerja di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat Kompakh adalah organisasi independen pariwisata di Kapuas Hulu. Didirikan pada tanggal 12 Maret 2005 atas prakarsa bersama antara

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dan WWF.

*Stakeholders* dari unsur perguruan tinggi yaitu Universitas Tanjungpura (Untan). Untan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak. Untan mempunyai peran dalam melaksanakan pendidikan lingkungan serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan.

*Stakeholders* dari unsur swasta yaitu yaitu pengusaha hotel, pengusaha tour dan travel, serta pengusaha transportasi. *Stakeholders* dari kelompok swasta memiliki peran dalam penyedia kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan penyediaan jasa pariwisata (penyediaan akomodasi, restoran/tempat makan, program pariwisata, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pengunjung).

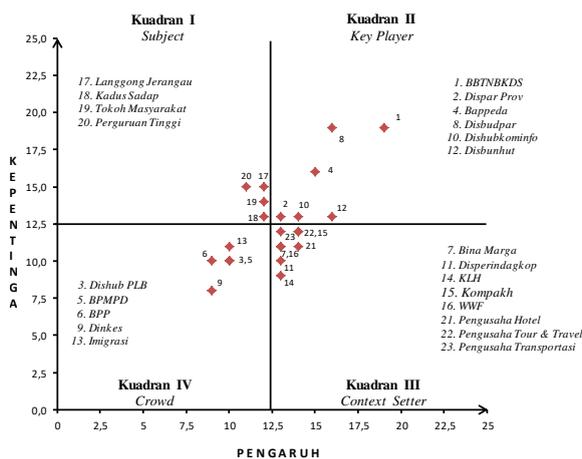
### 3.2. Klasifikasi Stakeholder

Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria kepentingan dan kriteria pengaruh (Tabel 2).

Tabel 2. Tingkat Kepentingan *Stakeholders*

No	Stakeholders	Pengaruh					Jumlah (X)	Kepentingan					Jumlah (Y)
		P1	P2	P3	P4	P5		K1	K2	K3	K4	K5	
1	BBTNBKDS	3	5	5	1	5	19	5	5	5	3	1	19
2	Disparekraf	2	1	5	2	3	13	1	5	2	3	2	13
3	Dishub PLBN Badau	2	2	3	1	2	10	1	5	2	1	1	10
4	Bappeda	3	2	5	2	3	15	3	5	3	2	3	16
5	BPMPPD	2	1	4	1	2	10	2	3	2	1	2	10
6	BPP	2	1	4	1	1	9	1	3	2	2	2	10
7	Dinas Bina Marga	3	1	4	3	2	13	2	2	1	3	3	11
8	Disbudpar	4	2	5	2	3	16	5	4	5	4	1	19
9	Diskes	2	1	3	1	2	9	2	3	1	1	1	8
10	Dishubkominfo	2	4	3	2	3	14	2	5	3	2	1	13
11	Disperindagkop	2	2	4	4	1	13	1	2	2	4	1	10
12	Disbunhut	3	3	5	2	3	16	3	5	2	2	1	13
13	Imigrasi	2	1	3	1	3	10	1	5	3	1	1	11
14	KLH	3	2	5	1	2	13	1	2	3	2	1	9
15	Kompakh	3	1	5	2	3	14	1	5	2	2	2	12
16	WWF	3	1	4	2	3	13	3	3	2	2	1	11
17	Langgong Jerangau	2	1	5	3	1	12	1	4	2	5	3	15
18	Kadus Sadap	2	3	5	1	1	12	2	4	4	2	1	13
19	Tokoh Masyarakat	4	1	4	1	2	12	2	3	2	3	4	14
20	Universitas Tanjungpura	2	1	5	1	2	11	5	5	3	1	1	15
21	Pengusaha Hotel	2	2	5	2	3	14	1	5	1	2	2	11
22	Pengusaha <i>Tour &amp; Travel</i>	2	2	5	2	3	14	1	5	1	2	3	12
23	Pengusaha Transportasi	2	1	5	2	3	13	1	5	2	2	2	12

Selanjutnya klasifikasi *stakeholders* dilakukan dengan menyandingkan hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders* ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh menggunakan *stakeholders grid*. Kategori pada matriks (Gambar 1) dapat menggambarkan posisi dan peranan yang dimainkan masing-masing *stakeholders* dalam pengembangan ekowisata di TNBK, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Matrik Kepentingan dan Pengaruh

a. Subject

Stakeholders yang masuk dalam kategori I (*Subjects*) merupakan pihak dengan kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Stakeholders yang termasuk dalam klasifikasi *Subject* terdiri dari kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yaitu Langgong Jerangau, Kepala Dusun Sadap, tokoh masyarakat dan Universitas Tanjungpura (Untan). Keempat stakeholders tersebut memiliki nilai penting yang tinggi terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata di TNBK, namun memiliki pengaruh yang rendah terhadap pengelolaan ekowisata di TNBK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempatnya merupakan stakeholders yang penting tetapi memerlukan pelibatan agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan ekowisata di TNBK. Pelibatan stakeholders tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan mengikutsertakannya di setiap tahapan pengelolaan.

b. Key player

Key Player yaitu stakeholders yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Stakeholders yang berada pada *Key Players* ini merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan suatu pengelolaan. BBTN BKDS memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekowisata di TNBK. BBTN BKDS mempunyai nilai kepentingan dan pengaruh yang tinggi karena sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Taman Nasional (UPTN) di lapangan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan TNBK. Hal ini ditemui di setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, dimana pengelola yang mendapat kekuasaan secara legal selalu menempati posisi sebagai pemangku kepentingan utama (Sembiring *et al.*, 2010; Maguire *et al.*, 2012).

Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap kawasan TNBK. Disbudpar merupakan instansi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Disbudpar memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dalam memperjuangkan aspirasi dalam pengembangan ekowisata di TNBK.

Kerjasama antara Disbudpar bersama Bappeda, Disbunhut, Dishubkominfo dan Disparekraf, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan program-program pengembangan ekowisata di TNBK.

c. Context setter

Context Setter merupakan stakeholders yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi kepentingannya rendah. Dinas Bina Marga, Disperindagkop, dan KLH memiliki nilai pengaruh tinggi yang dapat mempengaruhi pengelolaan TNBK. Hal ini dikarenakan mereka adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki wewenang yang besar untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan daerahnya.

WWF dan Kompakh memiliki pengaruh tinggi karena mereka mampu memainkan posisi intermediasi dan penyebaran informasi antar stakeholders dengan baik. Kompakh dapat menjadi mediator, fasilitator, serta media penghimpun dan penyedia informasi di bidang pariwisata. Sementara WWF sebagai lembaga internasional sudah biasa terlibat dalam kegiatan advokasi dan mediasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga cukup mempunyai pengaruh terhadap kegiatan pengelolaan. LSM yang selalu mendampingi masyarakat memiliki pengaruh yang tinggi dalam proyek tersebut. Kondisi ini ditemui pada pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat (Roslinda *et al.*, 2012).

Stakeholders dari kelompok swasta yaitu para pengusaha hotel, pengusaha tour dan travel, serta pengusaha transportasi. Mereka memiliki pengaruh yang tinggi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program pengembangan ekowisata di TNBK. Sebagaimana pada pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang menerangkan bahwa stakeholders yang berperan pada Context Setter dapat menjadi resiko yang signifikan dan perlu dipantau dan dikelola dengan hati-hati karena dapat memblokir pengembangan ekowisata (Siregar 2011).

d. Crowd

Crowd merupakan stakeholders dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. Stakeholders ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi namun dengan prioritas yang rendah. BPP dan BPMPD banyak berperan di bidang pemberdayaan dan kegiatan ekonomi, belum banyak berkontribusi terhadap pengelolaan ekowisata. Dinas Perhubungan PLBN Badau dan Kantor Imigrasi juga belum mampu berperan banyak. Kebijakan bebas visa bagi wisatawan mancanegara belum bisa diterapkan sepenuhnya. Fasilitas bebas visa di PLBN Badau hanya untuk wisatawan yang berasal dari Asean saja. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa kelima stakeholders ini memberikan perhatian juga, namun tidak terlibat secara langsung dengan pengembangan ekowisata di TNBK.

### 3.3. Hubungan Stakeholders

Deskripsi dari hubungan antar *stakeholders* menunjukkan alur hubungan antar *stakeholders* baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan. Dengan terjalinnya hubungan antar *stakeholders* dimaksudkan untuk membentuk suatu kesepakatan dan kesepahaman tentang konsep pengembangan ekowisata di kawasan TNBK. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Riani (2012) pada kegiatan pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan penelitian Widiyanti (2016) pada kegiatan tata kelola pengembangan ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur.

Hubungan antar *stakeholders* dalam pengembangan ekowisata di TNBK teridentifikasi dalam 3 hubungan yaitu hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Komunikasi merupakan bentuk hubungan yang penting dijalin oleh para *stakeholders*. Adanya komunikasi memberikan informasi kepada *stakeholders* yang terlibat dalam menyampaikan tingkat kepentingan *stakeholders* yang dapat mendukung program pengembangan ekowisata di TNBK. Koordinasi merupakan hubungan antar *stakeholders* yang paling banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan pada program pengembangan ekowisata di TNBK merupakan bentuk teknis dari pelaksanaan program. Sedangkan bentuk kerjasama merupakan bentuk hubungan yang dilakukan oleh *stakeholders* yang dilandasi oleh hak dan kewajiban (kontribusi) antar pihak berupa dukungan yang diperlukan dalam program pengembangan ekowisata di TNBK.

#### a. Kerjasama

Kerjasama (*cooperation*) adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama (Bungin 2008). Proses terjadinya *cooperation* apabila di antara individu atau kelompok tertentu menyadari adanya kepentingan dan ancaman yang sama. Kerjasama antar *stakeholders* terkait dengan pengembangan ekowisata di TNBK sebagian besar merupakan hubungan kerjasama atas dasar tupoksi, aturan kelembagaan, serta kesamaan visi dan misi suatu lembaga, instansi dan kelompok masyarakat.

Kerjasama antara BBTNBKDS selaku pengelola kawasan TNBK dengan Pemda Kapuas Hulu yang melibatkan masyarakat, LSM maupun pihak swasta banyak dilakukan. Untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) pihak BBTNBKDS bekerjasama dengan WWF dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Operasi. Kemudian untuk mengimplementasikan desain tapak pengelolaan pariwisata alam yang dihasilkan, BBTNBKDS menjalin kerjasama dengan Disbudpar. Kerjasama dalam rangka perlindungan dan pengamanan ODTW juga dilakukan antara BBTNBKDS, Disbunhut dan masyarakat dengan melakukan patroli bersama dan penandatanganan kesepakatan adat. Tujuannya yaitu untuk mencegah kegiatan melanggar hukum seperti *illegal logging*, *illegal fishing* dan perburuan satwa.

Untuk mensinkronkan pengembangan ekowisata di TNBK dengan tata ruang pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu maka Bappeda, Disbudpar, BBTNBKDS, Kompakh dan WWF kerjasama dalam forum-forum kajian seperti Kelompok Kerja Ekowisata, Kelompok Kerja Heart of Borneo (HoB). Kerjasama antara BBTNBKDS, Disbudpar, Dishubkominformasi dengan pihak swasta juga dilakukan pada kegiatan promosi dan publikasi obyek wisata dengan menggelar *event* pameran wisata tingkat daerah maupun nasional, seperti Festival Betung Kerihun Danau Sentarum dan Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara.

Usaha untuk meningkatkan akses menuju lokasi obyek wisata kerjasama dilakukan dengan Dishub dan pengusaha transportasi dalam hal perijinan dan pengadaan alat transportasi. Dalam kegiatan penelitian BBTNBKDS dan Disbunhut menggandeng Untan, Kompakh dan WWF. Kerjasama Kompakh dan WWF yang telah dilakukan diantaranya adalah program fasilitasi *knowledge sharing* Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Program *Assesment* Potensi Wisata Kawasan Pegunungan Muller.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kerjasama dilakukan antara BBTNBKDS, Disbudpar, Disparekraf, Untan dan pihak swasta. Contohnya yaitu menyelenggarakan *workshop* pengusaha pariwisata alam, pelatihan kependamuan menurut standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BBTNBKDS bersama Disbunhut, BPPMD, WWF dan aparat desa juga bekerjasama melakukan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata seperti pendampingan masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan menangkap peluang usaha, melakukan pelatihan budidaya pertanian, gaharu, peternakan, perikanan dan karet unggul.

#### b. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan makna (Bungin, 2008). Dalam komunikasi terkait dengan pengembangan ekowisata di TNBK ada tiga unsur penting yang selalu hadir dalam setiap komunikasi yaitu sumber informasi, media dan penerima informasi.

Hubungan komunikasi antar *stakeholders* terjadi pada hampir seluruh kegiatan pengembangan ekowisata di TNBK. Mulai dari inventarisasi dan identifikasi ODTW di kawasan taman nasional, kegiatan promosi dan publikasi, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan program ekowisata. Untuk perlindungan dan pengamanan ODTWA di TNBK, BBTNBKDS menjalin komunikasi dengan Disbunhut dan masyarakat sekitar kawasan TNBK dalam mensosialisasikan zonasi dan rencana pengelolaan TNBK, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem, bahaya kebakaran hutan, dan sosialisasi hukum adat. Komunikasi juga dijalin dengan biro per-

jalanan dan kelompok ekowisata tentang tata cara masuk ke kawasan TNBK menggunakan sistem Simaksi agar wisatawan tidak mengalami kesulitan.

BBTNBKDS juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta yaitu para pengusaha hotel, transportasi dan biro perjalanan terkait dengan keperluan para wisatawan akan alat transportasi, akomodasi dan penginapan. Pada kegiatan promosi dan publikasi obyek wisata, BBTNBKDS, Disbudpar dengan Dishubkominfo dan pihak pengusaha biro perjalanan saling berkomunikasi untuk tukar informasi mengenai program kegiatan wisata. Hubungan komunikasi antar instansi juga dilakukan Disbudpar, Disparekraf, Kantor Imigrasi dan Pengusaha hotel yaitu dalam pelaporan terkait dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk kepentingan penelitian BBTNBKDS selaku pengelola TNBK menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga yang aktif melakukan penelitian seperti WWF dan Universitas Tanjungpura. BBTNBKDS, Disbudpar, Disparekraf, Disperindagkop, BPP, Diskes, dan Kompakh juga menjalin komunikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata. Seperti pada kegiatan musyawarah rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, memberikan penyuluhan tentang program sadar wisata. Komunikasi juga dijalin dengan Kompakh yang menjadi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pemandu wisata bagi masyarakat sekitar kawasan TNBK.

### c. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Hubungan koordinasi antar *stakeholders* banyak ditemukan di lapangan. Bentuk koordinasi yang dilakukan merupakan bentuk teknis dari pelaksanaan program pengembangan ekowisata di TNBK.

BBTNBKDS sebagai pengelola TNBK harus berkoordinasi dengan instansi yang ada di pemerintahan daerah untuk sinkronisasi visi misi Kabupaten Kapuas Hulu. Diantaranya adalah Bappeda (perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah), Disperindag dan Disbunhut (hasil kerajinan, hasil hutan non kayu), BPMPD (Sumberdaya Manusia Desa), Diskes (sanitasi dan lingkungan bersih), Disbudpar (pendampingan desa wisata), Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan (infrastruktur jalan dan transportasi).

BBTNBKDS juga berkoordinasi dengan Disbunhut dan masyarakat untuk menjaga kawasan TNBK dengan patroli bersama polisi kehutanan. Koordinasi juga dilakukan dengan biro perjalanan dan Langgong Jerangau agar para pengunjung yang ingin masuk ke kawasan TNBK mengajukan surat ijin masuk kawasan konservasi (Simaksi). Kegiatan promosi dan publikasi memerlukan koordinasi yang baik antara BBTNBKDS,

Disbudpar, Disparekraf, Dishubkominfo, Disperindagkop dan pihak swasta, baik dalam pameran produk wisata, membuat buku, brosur, *sticker*, *film*, *billboard*, hingga penjualan hasil kerajinan, makanan/minuman olahan untuk *souvenir* atau cinderamata.

Hubungan koordinasi antara instansi pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya terhadap yang lebih rendah juga ditemui pada kegiatan pengembangan ekowisata di TNBK. Disparekraf Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Disbudpar Kabupaten Kapuas Hulu, Dishub PLBN Badau Provinsi Kalimantan Barat dengan Dishubkominfo Kabupaten Kapuas Hulu. Koordinasi tersebut dalam bentuk tugas pembantuan, pelaporan program kegiatan dan pengarahan dalam perencanaan suatu kegiatan.

Koordinasi dalam peningkatan kualitas SDM bidang ekowisata dan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan program ekowisata dilakukan oleh BBTNBKDS, Disbudpar, Diskes, KLH, BPMPD, Disperindag dan Disbunhut. Seperti pada kegiatan dalam program sadar wisata dengan melakukan penyuluhan terkait manajemen lingkungan, sosiokultur, kesehatan dan keselamatan kerja. Hubungan koordinasi antar *stakeholders* dilakukan untuk menyatukan persepsi kegiatan-kegiatan dalam pengembangan ekowisata di TNBK. Kondisi ini ditemui pada tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara yaitu agar kegiatan bisa berjalan efektif dilakukan koordinasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih (Santoso *et al.*, 2015).

## 4. Kesimpulan

Terdapat 23 *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata di TNBK, yang berkedudukan sebagai *Subject*, *Key Players*, *Context Setter* dan *Crowd* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. Hubungan yang terjadi di antara *stakeholders* berupa komunikasi, koordinasi dan kerjasama, baik yang tertulis di dalam dokumen (tupoksi) maupun yang terlaksana di lapangan. *Stakeholders* yang masuk dalam klasifikasi *Key Players* dan memiliki jalinan hubungan antar *stakeholders* yang banyak, memiliki peranan besar dalam pengembangan ekowisata di TNBK. Pengelolaan ekowisata secara kolaboratif, sinkronisasi program kegiatan antar *stakeholders* serta saling bersinergi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan ekowisata di TNBK.

## Daftar Pustaka

- [1] Beaumont, N. 2011. The third criterion of ecotourism: are ecotourism more concerned about sustainability than other tourists. *Journal of Ecotourism* 10(2), pp.135-148.
- [2] Bryson, J.M., 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis Techniques. *Public Management Review*. 6, pp. 21-53.

- [3] Bungin, B. 2008. *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Kencana, Jakarta
- [4] Dwyer, L., D. Edwards, 2000. Nature-based tourism on the edge of urban development. *Journal of Sustainable Tourism*. 8(4), pp.267-287.
- [5] Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga, Jakarta.
- [6] Maguire, B.,J. Potss,S. Fletcher, 2012. *The Role Of Stakeholders In Themarine Planning Process-Stakeholder Analysis Within The Solent*. Marine Policy, United Kingdom. 36, pp. 246-257.
- [7] Pegas, F., A. Coghlan, A. Stronza, V. Rocha., 2013. For love or for money? investigating the impact of an ectourism programe on local residents assigned values towards sea turtles. *Journal of Ecotourism*. 12(2), pp. 90-106.
- [8] Reed, S.M., A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Huback, J. Morris, C. Prell, C.H. Quin, L.C. Stringer, 2009. Who's in and why? w typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90, pp. 1933-1949.
- [9] Riani, M.W., 2012. Mekanisme hubungan para pihak dalam pengelolaan wisata alam di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- [10] Roslinda. E., D. Darusman, D. Suharjito, D.R. Nurrochmat, 2012. Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman nasional danau sentarum kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 18(2), pp. 78-85.
- [11] Santoso, H., E.K.S.H., Muntasib, H. Kartodiharjo, R. Soekmadi, 2015b, Peranan dan kebutuhan pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata di Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 12(3), pp. 197-211
- [12] Sekartjkrarini, S., 2009. *Kriteria dan Indikator Ekowisata Indonesia*. Idea. Bogor.
- [13] Sembiring. E., S. Basuni, R. Soekmadi, 2010. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 16(2), pp. 84-91.
- [14] Shoo, R., A. Songorwa. 2013. Contribution of ecotourism to nature conservation and improvement of livelihoods around amani nature reserve Tanzania. *Journal of Ecotourism*. 12 (2), pp. 75- 89.
- [15] Siregar, M., 2011. Peranan Stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- [16] Widiyanti, H., 2016. Strategi tata kelola pengembangan ekowisata di taman wisata alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.